

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori dan konsep, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Catalunya atau Catalonia adalah suatu daerah otonom di Spanyol yang memiliki luas wilayah sekitar 32.108 kilometer persegi dengan populasi sekitar 7.5 juta orang. Catalonia memiliki kota yang terkenal, yaitu Barcelona. Akan tetapi, Catalonia memutuskan untuk memisahkan diri dari Spanyol karena rakyat Catalonia merasa bahwa negara pusatnya tidak memberikan otonomi yang memadai. Selain itu, Catalonia juga memiliki identitas, budaya, dan bahasa yang berbeda dengan Spanyol, sehingga mereka merasa memiliki perbedaan dengan penduduk Spanyol. Ketegangan antara Catalonia dan Spanyol bukanlah hal baru, sejarah mencatat bahwa Catalonia sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Aragon, sementara Spanyol merupakan bagian dari Castilla. Pada tahun 1469, persatuan antara Ferdinand I dari Aragon dan Ratu Isabella dari Castilla melalui pernikahan menyatukan dinasti Castilla dan Kerajaan Aragon. Namun, pada saat itu Catalonia berusaha mempertahankan hak-hak tradisional dan parlemen mereka, yang kemudian dikenal sebagai Catalan Courts. (Nugrahani, 2022).

Gerakan separatisme Catalonia muncul dari perasaan nasionalisme yang kuat di wilayah tersebut. Catalonia merupakan wilayah yang memiliki budaya, bahasa dan sejarah yang unik jika dibandingkan dengan wilayah lain di Spanyol. Sejarah panjang Catalonia dalam pengalaman ekonomi dan politik yang berbeda dari Spanyol juga memperkuat perasaan nasionalisme tersebut. Gerakan separatisme Catalonia bermula pada abad ke 19, ketika beberapa pemikir Catalanian mulai menginginkan otonomi dan pemisahan diri dari Spanyol. Salah satu faktor gerakan ini muncul adalah karena perasaan nasionalisme yang kuat di Catalonia, yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perlakuan yang kuat dan berkembang juga menjadi faktor pendorong gerakan ini (Irene & Mansur, 2019).

Pada tahun 1906, Partai Regional Catalanian didirikan untuk mendukung otonomi Catalonia, dan gerakan ini terus berkembang selama berabad-abad. Pada tahun 1920 an, Partai Regional Catalanian mengubah namanya menjadi *Estat Catala* yang dipimpin oleh Francesc

Macia, yang membuat kampanye untuk otonomi Catalonia yang lebih luas. Pada tahun 1931, Catalonia menjadi negara federal dalam Spanyol, akan tetapi pada tahun 1939 setelah kekalahan dalam perang Spanyol, otonomi Catalonia dibatalkan oleh pemerintah nasionalis Francisco Franco. Setelah kematian Franco pada tahun 1975, Catalonia mulai menuntut otonomi kembali pada tahun 1979, Catalonia mendapatkan otonomi yang lebih luas melalui *Statuta d'Autonomia de Catalunya*. Gerakan separatisme kembali meningkat pada tahun 2006, ketika *Statuta de'Autonomia* diubah oleh pemerintah Spanyol yang mengurangi tingkat otonomi Catalonia, yang menyebabkan protes massal dan pemogokan. Dan hingga saat ini masalah tersebut menjadi masalah politik yang serius bagi Spanyol (Wangke, 2017).

Pada tanggal 1 Oktober 2017, Catalonia mengadakan sebuah referendum kemerdekaan. Namun, pengadilan di Spanyol menyatakan bahwa pemungutan suara tersebut ilegal dan memerintahkan polisi nasional serta Garda Sipil, sebuah unit militer yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri, untuk menghentikan referendum tersebut demi menjaga kestabilan dan kerukunan (Moeloek, 2017). Akibat peristiwa tersebut, terjadi lebih dari 750 korban jiwa di antara warga sipil akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Spanyol, dan di berbagai wilayah terus berlangsung demonstrasi yang menuntut pemerintah Spanyol untuk segera menyetujui referendum. Selain itu, beberapa tokoh terkemuka dari Catalonia, seperti Jordi Sanchez dan Jordi Cuixat, ditahan oleh pemerintah Spanyol. Mereka adalah pemimpin organisasi Omnium Cultural, dan penangkapan tersebut dilakukan atas perintah hakim Spanyol. Kedua tokoh ini dianggap sebagai pihak utama dalam penyelenggaraan peristiwa tersebut (BBC, 2017c).

Pemerintah Spanyol berpendapat bahwa referendum tersebut tidak sah dan melanggar konstitusi, meskipun hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa 90% penduduk Catalonia mendukung kemerdekaan dari Spanyol. Pada referendum tahun 2017, pemerintah Spanyol menolak mencapai kesepakatan apa pun melalui negosiasi atau mediasi dengan pihak Catalonia. Akibatnya, pemerintah Spanyol menghentikan otonomi Catalonia dengan mengacu pada Pasal 155 konstitusi Spanyol. Tindakan tersebut diambil karena peristiwa tersebut dianggap merugikan pemerintah pusat dan menyebabkan kekacauan (Irene & Mansur, 2019).

Sebelumnya, pada tahun 2014, masyarakat Catalonia juga telah mengadakan referendum pada bulan November. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan harapan Catalonia (Putra, 2020). Oleh karena itu, pada tahun 2017, Catalonia melanjutkan referendum kedua kalinya. Namun, seperti sebelumnya, upaya untuk mengadakan referendum tersebut tidak

berhasil karena tidak mendapat respon yang baik dari pemerintah pusat maupun organisasi-organisasi internasional. Isu-isu terkait separatisme dan referendum telah diatur dalam konstitusi Spanyol tahun 1978. Pasal 32 ayat 2 (Spanish Constitution, 1978a) dan pasal 92 ayat 1, 2, 3 (Spanish Constitution, 1978b) yang mengatur bahwa keputusan politik yang signifikan dapat diajukan kepada seluruh warga negara dalam sebuah referendum konsultatif, dan pelaksanaan referendum wajib mematuhi persyaratan dan prosedur yang dijelaskan dalam konstitusi. Jika semua persyaratan dan prosedur terpenuhi, kongres akan memberikan persetujuan untuk mengadakan referendum. Setelah itu, raja akan mengumumkan referendum setelah entitas tersebut memperoleh otorisasi dari kongres (Ragone, 1989).

Catalonia saat ini sedang berupaya untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara, terutama negara-negara dengan kekuatan besar, karena peran mereka memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan Catalonia dalam mencapai referendum pemisahan dari Spanyol (Generalitat de Catalunya, 2014). Sebelumnya, Catalonia telah melakukan berbagai upaya untuk membangun hubungan bilateral dan multilateral serta bergabung dengan organisasi internasional untuk mendapatkan pengakuan tersebut. Selanjutnya, Catalonia memenuhi kriteria Deklarasi Montevideo mengenai unsur-unsur yang diperlukan untuk pengakuan, seperti memiliki populasi permanen, wilayah yang jelas, pemerintahan yang secara efektif mengontrol populasi dan wilayah, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Catalonia telah menunjukkan komitmen ini karena berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang diinginkan (Generalitat de Catalunya, 2014).

Dalam konteks referendum Catalonia ini, penulis bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana peran gerakan pemisahan diri Catalonia dalam upaya mereka untuk mencapai kemerdekaan dari Spanyol, baik melalui upaya politik, kebijakan, maupun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Catalonia. Tujuannya adalah untuk mendorong pemerintah Spanyol agar menyetujui referendum, yang akan dianggap sah jika sesuai dengan konstitusi Spanyol tahun 1979 (Nugrahani, 2022).

Penulis merasa tertarik untuk mengkaji Catalonia karena perhatian penulis tertarik oleh fakta bahwa Catalonia tidak hanya mengadakan referendum sekali, tetapi mereka telah melakukan upaya berulang untuk mencapai tujuan mereka melalui referendum, walaupun hasilnya sama. Penulis mengamati bahwa upaya-upaya Catalonia semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama pada rentang waktu antara tahun 2014 hingga 2017. Hal ini menjadi

dasar bagi penulis untuk menganggap bahwa periode tersebut merupakan puncak dari gerakan pemisahan diri yang dilakukan oleh Catalonia.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa upaya pemisahan diri Catalonia dari Spanyol gagal untuk diwujudkan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami peristiwa pemisahan diri Catalonia yang terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2017.
2. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami faktor-faktor kegagalan Catalonia dalam memisahkan diri dari Spanyol.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis berupa pemahaman mengenai bagaimana peristiwa pemisahan diri Catalonia dari Spanyol.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penulis maupun pembaca untuk penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

1.5 Kerangka Konseptual dan Teori

1.5.1 Konsep Legitimasi

Ian Clark dalam bukunya menjelaskan terkait legitimasi kontemporer ia memetakan berbagai faktor yang mempengaruhi praktek legitimasi yang berkaitan dengan keanggotaan dan perilaku dimana didalamnya mencakup norma-norma internasional khusus seperti legalitas, moralitas, dan konstitusionalitas. Namun, seperti yang telah kita lihat, praktek legitimasi tidak secara langsung bersesuaian dengan norma-norma ini melainkan adanya mediasi melalui proses politik kontestasi dan pembentukan konsensus. Proses ini pada dasarnya, disaring melalui distribusi kekuasaan yang berlaku. Untuk itu dalam menganalisa legitimasi internasional ini Clark menjelaskan terkait unsur-unsur atau elemen untuk memahami bagaimana suatu legitimasi internasional dapat terwujud. Legitimasi, pada dasarnya, tidak dapat direduksi menjadi institusi atau norma apa pun, tetapi menggambarkan kondisi keseimbangan politik yang sangat bergejolak diantara berbagai elemen yang berusaha untuk mencapai sebuah legitimasi. Elemen-elemen yang disebutkan oleh Clark diantaranya; konsensus dan norma, yang mana norma ini terdapat norma legalitas, moralitas dan norma konstitusionalitas.

Clark berusaha untuk menjelaskan proses melalui prinsip-prinsip terbentuknya legitimasi internasional dan menyoroti peran aktor masyarakat dunia sebagai bagian dari proses ini. tidak ada aturan yang mengikat secara normatif selain dari yang secara konsensus disetujui, konsensus menjadi ukuran yang relevan dimana praktik negara harus dinilai sah. Clark mengidentifikasi ada dua prinsip inti legitimasi dalam masyarakat internasional. Yang pertama dari prinsip-prinsip ini mengacu pada definisi standar negara yang sah dan karena itu berkaitan dengan pertanyaan tentang siapa yang diakui sebagai anggota yang berhak dalam masyarakat internasional. Pemerintahan yang baik tampaknya telah menjadi kriteria utama untuk diterima sebagai anggota penuh masyarakat internasional dan untuk menikmati hak penuh partisipasi di dalamnya. Prinsip kedua menetapkan norma-norma yang mengidentifikasi tindakan negara dalam masyarakat internasional sebagai tindakan yang sah dan karena alasan itu berhubungan dengan praktik legitimasi negara dalam masyarakat internasional serta dalam pengambilan keputusan berdasarkan konsensus atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Konsensus tentang norma-norma bersama, dalam interpretasi ini, memainkan peran penting bagi legitimasi dalam masyarakat internasional, karena ia meletakkan dasar terakhir untuk menilai setiap aktivitas negara sebagai tindakan yang legitimate. Legitimasi organisasi internasional berasal dari kepercayaan masyarakat internasional untuk secara normatif terikat pada keputusan yang diambil di dalamnya. Mengidentifikasi tindakan negara dalam masyarakat internasional sebagai yang sah dan karena alasan itu berhubungan dengan praktik legitimasi negara dalam masyarakat internasional dalam pengambilan keputusan berdasarkan konsensus atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

Gagasan mengenai konsensus mengklaim bahwa keputusan dalam institusi politik adalah sah sejauh semua warga negara menyetujui mereka dengan satu atau lain cara. Pengaruh konsensus terlihat dalam prosedur pengambilan keputusan yang konkret seperti dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Legitimasi akan didapatkan dengan mendapatkan persetujuan sebanyak mungkin dari individu atau mayoritas, mayoritas akan memperkuat keputusan dari legitimasi selanjutnya. Konsensus adalah tentang persetujuan dalam proses pengambilan keputusan untuk menyetujui keputusan, lembaga, atau rezim politik.

Selain adanya keterkaitan antara legitimasi dengan konsensus, Legitimasi berkaitan erat dengan sejumlah norma internasional dan Clark membahas norma tersebut terdiri atas tiga bagian yaitu sebagai norma legalitas, moralitas, dan konstitusionalitas. Menurut Clark gagasan legitimasi selalu dimediasi melalui gabungan norma-norma lain yang berbeda dan tidak dapat dilakukan terhadap mereka secara individual. Legitimasi adalah gabungan dan

akomodasi antara sejumlah norma baik prosedural dan substantif dan tidak memiliki standar independennya sendiri yang dapat diukur tindakannya. Diantara norma-norma itu terdapat ketegangan bahwa ada konflik antara legitimasi dan legalitas, ini menyiratkan bahwa ada skala nilai legitimasi yang terpisah dalam arti yang sama dan setara bahwa ada seperangkat nilai legalitas, legitimasi merupakan salah satu sarana untuk mendefinisikan kembali legalitas dengan membandingkannya kedalam norma. Seperti yang dikatakan dalam kampanye pemisahan diri Catalonia bahwa ada kesenjangan yang tidak dapat diterima antara apa yang diizinkan oleh hukum internasional dan apa yang dituntut oleh moralitas. Legalitas tidak akan pernah bisa menjadi satu elemen dari legitimasi, melainkan ada beberapa elemen lainnya yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat mendapatkan legitimasi, seperti moralitas, dan konstitusionalitas.

Klaim legitimasi yang didasarkan pada moralitas yaitu sesuatu dapat dianggap sah meskipun ilegal, dalam kasus ini menegaskan bahwa meskipun tindakan itu tidak bermoral tetapi sah adalah dengan mengklaim bahwa meskipun tidak sesuai dengan beberapa nilai moral, apa yang dilakukan adalah sah secara hukum. Legitimasi tidak dapat sepenuhnya diidentifikasi dengan legalitas atau moralitas, juga tidak dapat sepenuhnya diidentifikasi dengan konstitusionalitas. Meskipun demikian, sekarang praktek legitimasi sangat memperhatikan kode konstitusionalitas, dan dengan klaim tentang pelanggaran mereka. Norma konstitusionalitas memiliki kapasitas lebih besar dibanding norma lainnya, dan perlu diketahui bahwa aturan konstitusional tidak mudah dirubah.

1.5.2 Teori Pemisahan Diri

Menurut Pantazopolous, teori pemisahan diri adalah permintaan dari suatu entitas untuk secara resmi memisahkan diri dari otoritas politik pusat berdasarkan aspirasi kemerdekaan. Dalam tesisnya, Pantazopolous mengkaji gerakan separatisme dan keinginan entitas untuk memisahkan diri dari negara induk. Tesis ini bertujuan untuk merumuskan sebuah teori yang menjelaskan dasar hukum internasional untuk pemisahan diri, serta memberikan perspektif sejarah mengenai beberapa gerakan separatisme. Teori pemisahan diri ini melibatkan beberapa elemen, seperti prasyarat untuk pemisahan diri, munculnya gerakan separatisme dan efektivitas tindakan mereka, tanggapan dari pemerintah pusat, perkembangan konfrontasi antara entitas yang ingin memisahkan diri dan negara tuan rumah, serta penyelesaian krisis separatisme berdasarkan aturan normatif (Pantazopolous, 1995).

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat penjelasan mengenai teori pemisahan diri yang mencakup elemen penting bahwa pemisahan tersebut hanya dianggap sah dalam kondisi-kondisi tertentu. Untuk memenuhi syarat legalitas, berikut adalah elemen-elemen yang harus terpenuhi: wilayah, peningkatan level keragaman, perbedaan tujuan, redistribusi diskriminatif, penurunan tingkat efisiensi, nasionalisme primordial, kepunahan budaya, antisipasi ancaman, ketidakadilan, dan kelangsungan hidup atau perdagangan. Pantazopolous juga menjelaskan dalam tulisannya bahwa gerakan pemisahan diri yang memiliki tingkat legalitas lebih tinggi dari 5/10 cenderung mendapatkan dukungan dari PBB dan organisasi internasional lainnya, sehingga tingkat keberhasilannya juga lebih tinggi. Sebaliknya, gerakan dengan tingkat legalitas yang rendah, kurang dari 5/10, akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan (Pantazopolous, 1995). Dalam penulisan ini, peneliti akan memanfaatkan variabel-variabel yang diajukan oleh Pantazopolous dalam teori pemisahan diri, dan peneliti akan memberikan definisi untuk setiap variabel tersebut:

1. Wilayah, wilayah yang dimaksud mengacu pada kemampuan kelompok yang ingin memisahkan diri untuk mempertimbangkan keberagaman penduduk dalam wilayah tersebut. Upaya ini meliputi pembelian properti mereka, perlindungan kepentingan dan hak-hak minoritas, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik (jika mereka memilih untuk tetap menjadi warga negara dalam negara yang terpecah). Oleh karena itu, mayoritas yang ingin memisahkan diri di wilayah yang telah ditentukan harus meningkatkan integritas mereka. Dalam konteks ini, wilayah tidak hanya merujuk pada aspek kultural semata.
2. Meningkatkan level keragaman, memiliki ciri khas budaya dan sejarah, dan sejauh mana tingkat keragaman tersebut berbeda dengan negara pusat merupakan faktor kunci. Argumen untuk meningkatkan keragaman semakin kuat ketika kelompok yang ingin memisahkan diri tidak memiliki perwakilan politik yang memadai di negara pusat. Oleh karena itu, entitas yang berupaya memisahkan diri harus menunjukkan tingkat keragaman mereka kepada dunia melalui berbagai cara, seperti melalui keterlibatan dalam perkumpulan budaya dan keanggotaan dalam organisasi internasional.
3. Perubahan tujuan, Perubahan tujuan adalah suatu kondisi di mana kelompok yang berkeinginan memisahkan diri dari suatu negara merasa bahwa pemerintah pusat tidak memenuhi tujuan dan harapan entitas tersebut.

4. Redistribusi diskriminatif, redistribusi diskriminatif terjadi saat pemerintah pusat secara sistematis mengambil sumber daya atau pajak dari suatu entitas dan menggunakannya dengan cara yang tidak adil terhadap sebagian penduduknya, sementara wilayah lain memperoleh standar hidup yang sebanding.
5. Penurunan tingkat efisiensi, peningkatan efisiensi terjadi saat pemerintah pusat memanfaatkan entitas tertentu untuk meningkatkan infrastruktur, yang berakibat pada penurunan efisiensi infrastruktur di wilayah yang dihuni oleh entitas tersebut.
6. Nasionalisme primordial, nasionalisme primordial merujuk pada sekelompok individu yang memiliki persamaan dalam hal budaya, agama, bahasa, etika, tradisi, dan sejarah.
7. Kepunahan budaya, pemeliharaan budaya menjadi alasan yang kuat bagi suatu entitas untuk berusaha memisahkan diri jika mereka merasa bahwa budaya mereka berisiko terancam dan menghadapi ancaman kepunahan yang nyata.
8. Antisipasi ancaman, untuk mengantisipasi ancaman yang ada, entitas yang ingin memisahkan diri harus meningkatkan kedudukan ekonomi dan militer mereka sebagai bagian dari persiapan pertahanan.
9. Ketidakadilan, ketidakadilan terjadi ketika mayoritas di negara pusat melakukan tindakan agresif terhadap kelompok minoritas dengan menggunakan kekerasan, mengancam untuk menghapus mereka, dan secara tidak menghormati melakukan pengambilalihan wilayah oleh pemerintah pusat.
10. Perdagangan/ kelangsungan hidup, kelangsungan hidup menjadi faktor penting yang mendorong pemisahan diri ketika entitas tersebut mampu menjalankan perdagangan sebagai sumber keberlanjutan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Pantazopolous, 1995).

Penulis akan mengaplikasikan 10 elemen ini kedalam pemisahan diri Catalonia, gerakan pemisahan diri akan sah dan diakui oleh komunitas internasional apabila minimal 5 dari 10 elemen ini terpenuhi, namun jika entitas mendapatkan kurang dari 5 maka entitas tersebut akan dihadapkan pada kesulitan dalam mendapatkan pengakuan untuk melakukan pemisahan diri. Berikut adalah hasil sementara dari operasionalisasi teori pemisahan diri:

Tabel 1. 1 Operasionalisasi Teori Pemisahan Diri

No	Variabel	Ya/Tidak	Operasionalisasi
1.	Wilayah	Tidak	Catalonia tidak memiliki hak atas wilayahnya karena dilihat dari sejarahnya.
2.	Meningkatkan Level Keragaman	Ya	Catalonia memiliki ciri khas yang unik secara kultural dan historis. Perbedaan antara Catalonia dengan Spanyol dalam perbedaan dalam budaya, bahasa, kegiatan sosial dan nilai etika.
3.	Perubahan Tujuan	Tidak	Tidak adanya perubahan tujuan karena Catalonia adalah nation state yang memiliki kewenangannya untuk mengatur tujuannya sendiri.
4.	Redistribusi Diskriminatif	Tidak	Adanya perbedaan pajak yang lebih besar yang harus dibayar oleh rakyat Catalan kepada pemerintah pusat. Akan tetapi tindakan yang diambil oleh pemerintah Spanyol dianggap adil terutama dalam redistribusi pajak, mengingat Catalonia merupakan wilayah terkaya di Spanyol yang bertanggungjawab untuk membantu daerah-daerah yang lebih miskin agar pembangunan diseluruh Spanyol dapat terdistribusi dengan adil.
5.	Penurunan Tingkat Efisiensi	Tidak	Tidak adanya penurunan efisiensi Infrastruktur di Catalonia, baik Catalonia maupun Spanyol mampu sama-sama meningkatkan infrastrukturnya.
6.	Nationalisme Primordial	Ya	Entitas yang ada di Catalan memiliki kesamaan budaya dan bahasa.
7.	Kepunahan Budaya	Tidak	Tidak adanya ancaman kepunahan budaya terhadap entitas Catalonia dari pemerintah pusatnya.
8.	Antisipasi Ancaman	Tidak	Catalonia tidak memiliki persiapan militer untuk melawan Spanyol apabila suatu saat Spanyol bertindak agresif.
9.	Ketidakadilan	Tidak	Pemerintah Spanyol tidak bertindak agresif sebelum dilakukannya upaya referendum oleh Catalonia.
10.	Kelangsungan hidup/Perdagangan	Ya	Dari sektor ekonomi, tumbuhnya sektor industri Catalan sebanyak 3,9% tahun 2017 dengan GDP mencapai 19,4%.
	Total	3/10	

Dalam menganalisis proses pemisahan diri yang terjadi di Catalonia, penulis akan menggunakan data yang tersedia dan menghubungkannya dengan variabel-variabel yang diambil dari teori pemisahan diri. Selanjutnya, data tersebut akan menjadi rujukan empiris dalam penelitian ini.

1.6 Hipotesa

Dalam kasus Catalonia, yang menjadi jawaban sementara bagi penulis adalah Proses pemisahan diri yang terjadi di Catalonia gagal karena tidak mendapatkan legitimasi dari pemerintah pusatnya yaitu Spanyol dan tidak adanya pengakuan dari komunitas internasional karena untuk mendapatkan pengakuan berdasarkan teori pemisahan diri minimal elemen yang terpenuhi adalah 5 dari 10 agar masyarakat internasional dapat memandang upaya pemisahan diri tersebut dan memberikan pengakuannya, namun disini penulis melihat Catalonia hanya mampu memenuhi 3 dari 10 elemen yang ada dalam teori pemisahan diri. Dan hal tersebut tentunya akan memberatkan dalam mendapatkan pengakuan secara global.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif melalui data yang telah dikumpulkan dengan melakukan pengamatan dalam memahami permasalahan yang penulis angkat. Penggunaan metode kualitatif menggunakan data sekunder berupa tulisan dalam bentuk jurnal, artikel dan beberapa buku bacaan yang berkaitan dengan masalah penentuan diri dan separatis di Catalonia.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I: Pada Bab ini, membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesa dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada Bab ini, membahas mengenai gambaran umum tentang sejarah Catalonia bergabung dengan Spanyol, sejarah gerakan pemisahan diri Catalonia, referendum 2014 dan referendum 2017

BAB III: Pada Bab ini, membahas mengenai analisis faktor kegagalan pemisahan diri Catalonia dari Spanyol berdasarkan teori Pemisahan Diri

BAB IV: Pada Bab ini, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.